



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KOMANG GEDE IRAWADI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **209898**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.675.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/104 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m²/122 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah Seluas 261 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m²/176.65 m² di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
5. Tanah Seluas 204 m² di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m²/40 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
7. Tanah Seluas 150 m² di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 630.450.000**

1. MOTOR, HONDA NC 11BF1D A/T / MOTOR SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.450.000
2. MOTOR, KAWASAKI BX25DA / SPD MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, HONDA HONDA HRV RV1 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000



4. MOTOR, VESPA LX 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
395.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.973.500

D. SURAT BERHARGA Rp. 25.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 420.535.120

F. HARTA LAINNYA Rp. 195.194.904

Sub Total Rp. 2.991.153.524

III. HUTANG Rp. 9.475.251

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.981.678.273

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.